

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat (sumber: www.kemenkopmk.go.id). Jumlah penduduk Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Menurut BPS jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 berjumlah 255.461.700 juta jiwa. (sumber: www.bps.go.id)

Tentunya dengan jumlah penduduk sebanyak itu muncul berbagai masalah kependudukan di Indonesia terutama masalah kemiskinan, pengangguran, persebaran penduduk yang tidak merata, dan sebagainya. Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang atau sebesar 10,86 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. (sumber: www.bps.go.id)

Selain kemiskinan, permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia adalah masalah pengangguran. Lapangan kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang ada, ditambah dengan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang mayoritas masih rendah mengakibatkan pengangguran semakin bertambah. Banyaknya permasalahan kependudukan, maka mengakibatkan proses pembangunan ekonomi menjadi terhambat. Mendukung tercapainya pembangunan ekonomi pemerintah melakukan banyak hal salah satunya adalah dengan mengembangkan UKM (Usaha Kecil dan Menengah), khususnya UK

(Usaha Kecil) karena dinilai dapat mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan (Tambunan, 2002:1).

Definisi tentang UKM sangat beragam di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang. Sedangkan menurut Undang- Undang no 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang disebut usaha kecil merupakan entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut: (1) kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak 2.500.000.000. sementara itu yang disebut dengan usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut: (1) kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00. (sumber: www.bi.go.id)

Keberadaan UKM diharapkan dapat memberi suatu kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah ekonomi sosial seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi dengan segala efek negatifnya. Maka dari itu di Indonesia kebijakan pengembangan UKM sering dianggap secara

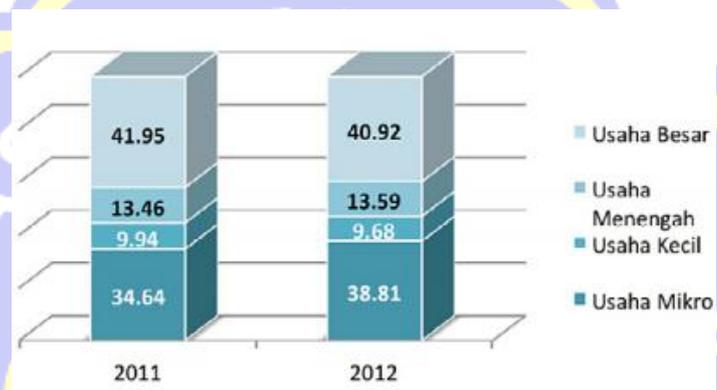
tidak langsung sebagai kebijakan penciptaan kesempatan kerja, kebijakan anti kemiskinan, atau kebijakan redistribusi pendapatan (Tambunan, 2002:1).

UKM juga mampu bertahan ketika terjadinya krisis ekonomi, karena pada umumnya sektor ini masih memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu untuk sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Salah satu contohnya krisis yang terjadi pada tahun 1998, pada saat itu UKM yang berorientasi ekspor mengalami *windfall profit* akibat depresiasi rupiah karena mereka mendapatkan penghasilan dalam dolar Amerika Serikat. UKM juga tidak terpengaruh oleh *credit crunch* karena pada umumnya sektor ini tidak ditopang dana pinjaman dari bank, melainkan dari dana sendiri untuk mengembangkan usahanya, sehingga tidak terlalu terpengaruh ketika terjadi krisis ekonomi seperti usaha besar yang umumnya bergantung pada modal pinjaman dari bank (Thahir, 2013:1).

UKM di Indonesia sangat penting dalam hal penciptaan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan besarnya jumlah angkatan kerja yang ada di Indonesia tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik sehingga banyak angkatan kerja yang tidak dapat diserap oleh industri besar, karena pada kelompok usaha besar relatif padat modal berbeda dengan UKM yang relatif padat karya. Maka dari itu UKM dapat mengurangi persoalan pengangguran di Indonesia karena industri kecil membutuhkan banyak tenaga kerja.

Di Indonesia konsentrasi UKM berada di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan wilayah ini merupakan wilayah di Indonesia dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Hubungan antara pertumbuhan UKM dan kenaikan tingkat pendapatan riil perkapita juga bisa negatif atau positif dengan tingkat kemiskinan yang ada, yang

artinya kegiatan UKM merupakan pilihan terakhir bagi mereka yang tidak memperoleh pekerjaan (pengangguran dan masyarakat miskin). Hal ini disebabkan karena pendidikan mereka rendah mengakibatkan mereka tidak bisa bekerja disektor formal sehingga mereka terpaksa untuk melakukan pekerjaan apa saja seperti membuka usaha kecil untuk menjadi sumber pendapatan (Tambunan, 2012: 293).



Gambar1: Perkembangan Usaha Besar dan UMKM tahun 2011-2012

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM 2014, selama tahun 2011 sampai 2012 terjadi pertumbuhan pada UMKM serta penurunan pada usaha besar. Bila pada tahun 2011, usaha besar mencapai 41,95% tahun berikutnya hanya 40,92%, turun sekitar 1,03%. Pada UMKM terjadi sebaliknya. Bila usaha menengah pada tahun 2011 hanya 13,46%, pada tahun 2012 mencapai 13,59%. Ada peningkatan sebesar 0,13%. Berbeda dengan usaha kecil, ada sedikit penurunan dari tahun 2011. Pada tahun itu mencapai 9,94% namun pada tahun 2012 hanya mencapai 9,68%, artinya menurun sekitar 0,26%. Peningkatan cukup besar terjadi pada usaha mikro, bila tahun 2011 hanya mencapai 34,64%, pada tahun 2012 berhasil meraih 38,81% terjadi peningkatan sebesar 4,17% (sumber: www.bi.go.id)

Industri kecil yang ada di Indonesia mayoritas memproduksi makanan dan kerajinan tangan. Salah satunya seperti yang ada di Kabupaten Banyumas. Di kabupaten ini terdapat banyak industri kecil yang memproduksi makanan seperti gethuk, tempe, tahu dan sebagainya.

Menurut statistik daerah Kabupaten Banyumas tahun 2016 industri makanan dan minuman menjadi penyumbang terbesar dalam sektor industri. Kontribusi sektor industri cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Indikasi ini menandakan bahwa prospek disektor industri di Kabupaten Banyumas semakin bagus. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 23,85 % terhadap total PDRB tahun 2015. Industri makanan dan minuman tersebar diberbagai daerah di Banyumas dengan adanya industri tersebut mampu menyerap banyak tenaga kerja di wilayah Banyumas itu sendiri namun, berdasarkan data dari Forum Konsultasi Publik tercatat ada beberapa kecamatan yang termasuk termiskin di Banyumas yang pertama ada Kecamatan Cilongok mempunyai jumlah usulan Rumah Tangga Sasaran (RTS) terbanyak yakni 21.914, selanjutnya ada Kecamatan Ajibarang 16.213 RTS, dan Kecamatan Sumbang 14.568 RTS (<http://radarbanyumas.co.id>).

Suatu kecamatan disebut kecamatan termiskin disebabkan karena selain usulan RTS terbanyak, juga karena jumlah warga miskin di wilayah tersebut banyak. Wilayah yang cukup luas, Cilongok dan Sumbang juga mempunyai jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lain. Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya masyarakat miskin di Cilongok, Kondisi geografis Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Sumbang juga yang mempengaruhi kondisi perekonomian di daerah tersebut. Kondisi geografis kedua daerah tersebut berupa pegunungan, yang menyebabkan kurang beragamnya pertanian di wilayah Kecamatan Cilongok dan Sumbang. Berbeda dengan kecamatan lain, dimana banyak tanaman yang bisa diolah sehingga bisa

mendongkrak dari segi perekonomian. Walaupun seperti itu ada satu desa di Kecamatan Cilongok yang terkenal sebagai desa sentra industri tahu yaitu Desa Kalisari.

Berdasarkan data dari pemerintah Desa Kalisari, hampir seperempat dari jumlah penduduknya mayoritas bertumpu pada industri tahu. Dari total 1413 KK, terdapat 268 UKM yang tersebar di desa seluas 204.533 hektar. Banyaknya jumlah pengrajin tahu di Desa kalisari sehingga, sekitar 9 ton biji kedelai impor didatangkan dan diolah setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan pembuatan tahu di Desa Kalisari. Kedelai yang digunakan dalam proses pembuatan tahu menggunakan kedelai impor dikarenakan kedelai lokal tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam pembuatan tahu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok industri tahu, industri kecil tahu di Desa Kalisari sudah terkenal sejak tahun 1965. Perkembangan industri tahu di Desa kalisari semakin meningkat setiap tahunnya, walaupun jumlah pengrajin tahu sempat menurun drastis diakibatkan mahalnnya harga kedelai hal ini dibuktikan dengan sudah dipatenkannya merk dagang untuk tahu yang dibuat di Desa Kalisari yaitu dengan merk “Tahu Sari Delai” dengan nomor REG. DIY2014.00350. Dipatenkannya merk tahu dari Desa Kalisari ini digunakan untuk meningkatkan popularitas produk dan menguatkan proses pemasaran. Tercatat baru 87 pengrajin yang mempunyai izin PIRT dari 268 total pengrajin. Selain dengan memantanken merk produk tahu, setiap tahunnya diadakan Festival Tahu Kalisari yang berisi kegiatan fashion show produk tahu, ekspo produk tahu,

lomba kuliner tahu, dan seni budaya tradisional serta modern agar tahu dari Desa Kalisari semakin berkembang.

Industri tahu yang ada di Desa Kalisari berbentuk industri rumah tangga, sehingga hampir setiap rumah memproduksi tahu. Banyaknya jumlah pabrik tahu rumahan yang ada tentunya membawa permasalahan yang baru yaitu permasalahan limbah tahu baik cair maupun padat. Untuk limbah cair dibuang ke sungai-sungai sekitar pabrik tahu, sehingga mengotori sungai-sungai yang ada dan terjadi pencemaran lingkungan yang mengakibatkan ikan-ikan mati. Untuk limbah padat dijual kembali untuk digunakan sebagai pakan ternak. Untuk saat ini permasalahan limbah di Desa Kalisari sudah tertangani walaupun pengelolaannya belum maksimal karena sejak tahun 2009 sudah dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah air limbah menjadi biogas yang saat ini sudah dapat dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Desa Kalisari sekitar IPAL.

Selain membuat tahu, para pengusaha tahu di Desa Kalisari saat ini dapat memanfaatkan limbah padat dari proses pembuatan tahu dengan memanfaatkannya sebagai produk olahan yaitu kerupuk ampas tahu. kerupuk ini mempunyai merk dagang dengan nama Kerupuk Okara. Saat ini pemasaran Kerupuk Okara sudah sampai Banjarnegara, Purbalingga, Bumiayu, Cilacap dan sekitarnya. Selain dimanfaatkan sebagai kerupuk limbah padat tahu juga dapat dibuat sebagai brownies dan pudding. Namun sayangnya untuk produk brownies dan pudding pemasarannya belum sebaik pemasaran Kerupuk Okara.

Banyaknya pengusaha tahu yang ada hal ini tentunya dapat menyerap banyak tenaga kerja yang ada di Desa Kalisari. Tenaga kerja yang dibutuhkan

dalam satu pabrik tahu biasanya membutuhkan 5-10 orang pekerja tergantung seberapa besar pabrik tahu tersebut. Para pengusaha tahu tersebut biasanya mempekerjakan keluarga atau saudaranya untuk bekerja di pabrik tahu mereka. Usaha ini kebanyakan dijalankan secara turun temurun dan dijadikan sebagai sumber pemasukan utama mayoritas masyarakat Desa Kalisari terutama bagi masyarakat desa Kalisari yang berpendidikan rendah. Hal ini mempengaruhi bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Kalisari terlebih lagi usaha industri tahu ini sudah berlangsung lama.

Melalui latar belakang di atas, peneliti ingin lebih mendalami tentang bagaimana peran adanya industri kecil tahu terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Kalisari. Sehingga peneliti mengambil judul **“Peran Usaha Industri Kecil Tahu terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Cilongok menjadi kecamatan termiskin dari jumlah total 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas.
2. Menurunnya jumlah industri kecil tahu di Desa Kalisari setelah tahun 2004 karena mahalnya harga kedelai sehingga banyak pengrajin tahu mengalami kebangkrutan.
3. Rendahnya tingkat pendidikan para pemilik industri tahu di Desa Kalisari.
4. Strategi pemasaran tahu kurang kreatif.

5. Rendahnya tingkat sosial ekonomi warga Desa Kalisari mendorong banyak warga Desa Kalisari bekerja menjadi pengrajin tahu.
6. Belum diketahui peran adanya industri kecil tahu terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Kalisari.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penelitian dibatasi pada masalah belum diketahui peran adanya industri kecil tahu terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Kalisari.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, dapat diajukan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran industri kecil tahu terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas setelah adanya industri kecil tahu?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran industri kecil tahu terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas setelah adanya industri kecil tahu.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi berbagai pihak.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur atau kajian teoritis mengenai kajian tentang sosial ekonomi.
- b. Dapat digunakan untuk menambah perbendaharaan pengetahuan keilmuan khususnya tentang industri di pedesaan di Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.
- c. Sebagai sumber informasi dan bahan bacaan bagi pengembangan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Sebagai wahana latihan menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan.
- 2) Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu peran industri kecil tahu terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.

b. Bagi Pemerintah

Menjadi masukan dan bahan pembuatan kebijakan dalam pengembangan dan peningkatan perekonomian desa khususnya bagi pengusaha industri kecil Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

